BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang berdasarkan kebutuhan dengan penjual sebagai pemasok barang dan pembeli sebagai penerima barang sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban.

Didalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 pengertian jual beli adalah antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang tidak terpisahkan dari perjanjian jual beli adalah peralihan hak milik atas barang dan pembayarannya harus dilakukan dengan

uang. Jika Pengalihan kepemilikan sesuatu tanpa uang maka bukanlah perjanjian penjualan, tetapi transaksi pertukaran.

Menurut R. Subekti jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut. Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.¹⁷

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Dalam KUH Perdata Pasal 1320, syarat membuat suatu menjadi sah adalah sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Persyaratan pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berhubungan dengan para pihak dalam sebuah perjanjian. Persyaratan ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena berhubungan dengan objek dari perjanjian tersebut, jika syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka, perjanjian tersebut batal demi

¹⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Kesepuluh (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1

hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Dan jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

3. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”

2. Asas Kesepakatan/Konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian ”

3. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang mengadakan perjanjian terikat dengan pelaksanaannya karena perjanjian itu berisi janji-janji yang harus dipenuhi dan janji-janji itu mengikat para pihak secara hukum.

4. Asas Itikat Baik

Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata bahwa sebuah perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad yang baik.

5. Asas Kepribadian

Dalam KUH Perdata asas kepribadian tersirat dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan juga tersirat dalam pasal **1340 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi

Menurut Mursyidi (2010),¹⁸ transaksi adalah suatu kejadian dalam dunia bisnis yang tidak hanya pada proses jual – beli, pembayaran, dan penerimaan uang, namun juga akibat adanya kehilangan, kebakaran, arus, dan peristiwa lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan transaksi menurut Sunarto Zulkifli,¹⁹ bahwa secara umum dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang lainnya

¹⁸ Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia

¹⁹ Sunarto Zulkifli , 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, hlm 10

atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu kesepakatan hukum atau syariah yang berlangsung.

Berdasarkan pihak yang melakukan transaksi, maka transaksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Transaksi Langsung

Transaksi langsung adalah transaksi yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanpa perantara atau tanpa pihak yang bertindak sebagai agen untuk salah satu atau kedua belah pihak dengan tujuan menyelesaikan transaksi.

3. Transaksi Tidak Langsung

Transaksi tidak langsung adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, namun transaksi tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi, melainkan melalui perantara yang akan melakukan transaksi atas nama mereka.

C. Tinjauan Umum Tentang *Blockchain*

Yaga dkk (2018),²⁰ mengatakan bahwa *Blockchain* adalah buku besar digital atau *ledger* yang didistribusikan dari buku besar digital atau

²⁰ Dylan Yaga, Peter Mell, Nik Roby dan Karen Scarfone, 2018, *Blockchain Technology Overview. National Institute of Standard and Technology Internal Reports*, <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202>

transaksi terenkripsi yang dikelompokkan dalam blok. Berkaitan dengan definisi *Blockchain* menurut Yaga dkk (2018) *blockchain* umumnya aman dan tidak mudah untuk diubah nilainya karena *blockchain* merupakan *database* terdistribusi yang mencatat semua transaksi atau pertukaran semua blok dan dilindungi dengan metode keamanan terenkripsi.

Menurut Bahga dan Madiseti (2016),²¹ *blockchain* merupakan suatu konsep teknologi dimana transaksi tercatat dengan andal tanpa adanya pihak ketiga untuk menjaminnya, sehingga diganti dengan setiap penggunanya dapat saling memverifikasi informasi terkait transaksi secara bersama-sama. *Blockchain* adalah rekaman atau catatan (*data base*) yang terus berkembang yang disebut blok, ditautkan dan diamankan menggunakan teknik kriptografi. Setiap blok berisi hash kriptografi dari blok sebelumnya, stempel waktu, dan data transaksi. Setiap blok dalam sistem ini saling berhubungan, dan setiap upaya untuk mengubah data di satu blok harus mengubah data di blok lain. Setiap blok yang dilindungi secara kriptografi terhubung satu sama lain untuk membentuk jaringan. Setiap komputer di jaringan secara terus menerus dan secara sistematis memvalidasi salinan *blockchain*-nya terhadap setiap salinan lainnya di jaringan. Aplikasi *blockchain* yang dikenal luas saat ini

²¹ Arshdeep Bahga dan Vijay Madiseti, 2016, *Blockchain Platform for Industrial Internet of Things*. *Journal Software Engineering and Applications*, Volume 9 (10), hlm 533-546. <https://doi.org/10.4236/jsea.2016.910036>

adalah *ledger* atau buku besar transaksi menggunakan *cryptocurrency* seperti *bitcoin*.²²

D. Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency*

Menurut Sukamulja & Sikora (2018),²³ mata uang kripto adalah sebuah aset *digital* yang dirancang sebagai media untuk pertukaran menggunakan *cryptocurrency* yang bertujuan untuk mengamankan transaksi dan untuk mengendalikan penciptaan dari unit mata uang tambahan. Sedangkan menurut Dourado & Brito (2014),²⁴ *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang terbentuk dari teknologi *blockchain* menggunakan *cryptography* untuk memproses pengiriman data *digital* dengan aman dan tersebar.

Menurut Ibnu Saefullah dalam bukunya *Bitcoin dan Cryptocurrency* menjelaskan bahwasannya mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah mata uang digital *peer to peer* yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip- prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat

²² Ade Chandra Nugraha, 2020, Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Lingkungan Pendidikan, *Jurnal Produktif*, Volume 4, hlm 303. <https://doi.org/10.35568/produktif.v4i1.386>

²³ Sukmawati Sukamulja dan Cornelia Olivia Sikora, 2018, *The New Era Of Financial Innovation: The Determinants Of Bitcoin's Price*. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(1), hlm 46- 64.

²⁴ Dourado, Eli dan Jerry Brito. 2014. *Cryptocurrency*. *The New Palgrave Dictionary of Economics*. London

seseorang tinggal tetapi ada perbedaan besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun.²⁵

Cryptocurrency didasarkan pada teknologi *blockchain* dimana hal ini sering digunakan sebagai mata uang digital. Tidak seperti mata uang tradisional, *cryptocurrency* dapat digunakan untuk transaksi virtual ataupun transaksi online. Untuk memastikan keamanan, *cryptocurrency* dilindungi dengan sandi yang cukup rumit. Selain itu, mata uang digital ini juga terdesentralisasi, jadi tidak ada perantara dalam transaksinya.

E. Tinjauan Umum Tentang *Bitcoin*

1. Gambaran Umum *Bitcoin*

Bitcoin merupakan *cryptocurrency* terdesentralisasi yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Awalnya *bitcoin* diciptakan semata-mata sebagai alat transfer uang antar pengguna ke berbagai pengguna di belahan dunia tanpa menggunakan perantara perbankan konvensional. Namun dalam perkembangannya, *bitcoin* menjadi investasi yang dinilai sangat menguntungkan.²⁶

Inti utama dari *bitcoin* adalah buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*), yang disebut dengan *blockchain*. Buku besar umum ini mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan *bitcoin*,

²⁵ Ibnu Saefullah, 2017, *Bitcoin & Cryptocurrency*, Kainoe Books : Indramayu, hal 1

²⁶ Dimaz Ankaa Wijaya, 2016, *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara : Medan, hlm 15

dari sejak *bitcoin* ditambang semua transaksi dicatat, sehingga hal inilah yang membuat *bitcoin* tidak mudah dipalsukan. unsur-unsur *bitcoin* adalah adanya jaringan *peer-to-peer*, blok, *blockchain* dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* dalam *bitcoin* memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai *bitcoin*, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan *blockchain*, dan *miners* memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan *bitcoin*.²⁷

Setiap pengguna *bitcoin* biasanya terdiri dari pasangan kunci publik dan pribadi. Kunci publik adalah alamat *bitcoin* mereka yang diketahui publik sebagai alamat tujuan transfer dan kunci privat sebagai properti dari *bitcoin* yang mereka miliki. Jika seseorang mengetahui informasi kunci publik atau alamatnya, seseorang dapat melihat semua transaksi orang tersebut, peredaran *bitcoin* di alamat tersebut, dan bahkan saldo terakhir *bitcoin* yang mereka miliki.

2. Cara Memperoleh *Bitcoin*

Saat ini, *bitcoin* dapat diperoleh dengan berbagai cara, namun cara yang paling umum adalah dengan memberikan layanan atau menjual sesuatu dengan upah atau pembayaran *bitcoin*, membelinya dari individu,

²⁷ Tiara Dhana Danella, 2015, Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.
<https://media.neliti.com/media/publications/35345-ID-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-legal-dalam-transaksi-online.pdf>

atau melalui pertukaran *bitcoin* ataupun bursa, dan yang terakhir adalah mendapatkan dengan penambangan dengan alat khusus.

Salah satu cara memperoleh *bitcoin* adalah dengan membeli *bitcoin* secara langsung dengan menukar mata uang resmi (Rupiah) melalui beberapa *platform* yang menjual atau membeli aset *crypto* seperti indodax atau tokocrypto. Selain itu, terdapat juga beberapa negara seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, Jepang, El Salvador dan beberapa negara di Uni Eropa yang menerapkan pembayaran menggunakan *bitcoin*. Cara lain untuk mendapatkan *bitcoin* adalah dengan bekerja untuk mendapatkan upah *bitcoin*. Cara ini cukup sederhana dan tidak memerlukan biaya yang banyak.

Dan cara terakhir adalah dengan melakukan penambangan. Menambang hanya bisa dilakukan melalui komputer khusus atau dengan alat tambang tertentu. Para penambang baru bisa diberi imbalan setelah memecahkan rumus matematika ribuan kali lamanya. Dahulu cara ini merupakan cara yang cukup mudah untuk mendapatkan banyak *bitcoin* namun sekarang karena jumlah transaksi yang banyak membuat tingkat kesulitan memecahkan rumus matematika tersebut dinaikkan dan imbalannya menjadi lebih sedikit. Cara ini juga memerlukan biaya yang cukup besar untuk membeli komputer atau alat menambang khusus tersebut dan biaya listrik.²⁸

²⁸ Dimaz Ankaa Wijaya, 2016, *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara : Medan, hlm 60

3. *Bitcoin Exchange*

Untuk bisa menggunakan *bitcoin* sebelumnya, pengguna harus mengunduh virtual wallet atau dompet yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Ada 3 jenis dompet virtual yaitu dompet perangkat lunak, dompet seluler, dan dompet web. Perbedaan antara ketiga dompet tersebut adalah tempat penyimpanan *bitcoin*. Dalam dompet perangkat lunak atau dompet perangkat lunak, *bitcoin* akan disimpan di *hard drive*, artinya komputer mana pun yang digunakan untuk mengunduh dompet perangkat lunak akan menjadi tempat penyimpanan *bitcoin*. Jika komputer digunakan rusak, *bitcoin* yang disimpan juga akan hilang. Meskipun sistem dompet seluler berfungsi seperti dompet perangkat lunak, media yang digunakan adalah ponsel. Dompet web memungkinkan *bitcoin* digunakan di mana saja menggunakan internet. Tidak jauh berbeda dengan perbankan online, dengan dompet web, pengguna dapat melihat *bitcoin* yang disimpan kapan saja, di mana saja. Dompet ini memiliki fungsi yang sama dengan bank biasa lainnya yaitu melindungi aset nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun dompet juga memiliki perbedaan yaitu tidak dapat dikendalikan. terjadi pada dompet pengguna, seperti serangan peretas, *bitcoin* yang disimpan di dompet bukanlah risiko yang dapat ditanggung pemerintah. *Bitcoin* adalah alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu transaksi karena *bitcoin* tidak membutuhkan jasa broker. Dalam mata uang konvensional, prosedur dan biaya yang panjang diperlukan untuk bertransaksi.

F. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli *Bitcoin*

1. Pengertian transaksi jual beli *bitcoin*

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁹ Transaksi jual beli *bitcoin* merupakan kegiatan jual beli online atau juga disebut dengan transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya atau antar penggunaanya melalui sarana *marketplace bitcoin*.

Pada dasarnya jual beli *bitcoin* melalui transaksi elektronik sama saja dengan jual beli secara tradisional, bedanya hanya di media elektronik. Jadi para pihak tidak bertemu secara langsung. *Bitcoin* merupakan salah satu aset kripto, menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka disebut dengan perdagangan aset kripto.

Pada jual beli *bitcoin* juga tercipta suatu kontrak yang disebut dengan kontrak elektronik, hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

transaksi elektronik.³⁰ Pada pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Dalam hal ini dikarenakan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini jual beli dapat dilakukan tidak hanya secara tatap muka antara penjual dan pembeli, akan tetapi transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan melalui media elektronik ataupun internet.

2. Metode jual beli *bitcoin*

Metode jual beli *bitcoin* yang pertama yaitu dengan cara langsung yaitu menjual atau membeli langsung tanpa melalui *marketplace*. Cara ini cukup sederhana yaitu anggota atau member cukup membuka menu jual/beli *bitcoin* instan dan kemudian memilih untuk menjual ataupun membeli, apabila anggota atau member ingin membeli, cukup mengisi nilai nominal sesuai dana yang telah disetorkan.

Metode yang kedua transaksi jual beli *bitcoin* dalam website ataupun aplikasi jual beli *bitcoin* seperti indodax ataupun tokocrypto yaitu :

1. Metode *market maker*, yaitu *member* atau anggota setelah berhasil melakukan penyetoran berupa uang rupiah atau *bitcoin* kemudian masuk ke menu '*marketplace*' dan pilih *market*

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

dengan nama BTC/IDR lalu pilih metode limit dan isi nominal sesuai keinginan *member* atau anggota setelah itu klik tombol OK. Status *order* akan tertunda/pending hingga harga pasar menyentuh harga yang ditetapkan oleh *member*, apabila *order* telah selesai maka saldo Rupiah akan muncul di saldo akun *member*.

2. Metode *market taker*, yaitu yaitu *member* atau anggota setelah berhasil melakukan penyetoran berupa uang rupiah atau *bitcoin* kemudian masuk ke menu '*marketplace*' dan pilih *market* dengan nama BTC/IDR lalu pilih metode *market/instant* lalu klik tombol OK dan *order* akan berhasil sukses dengan instan tanpa menunggu seperti metode *market maker*.

G. Tinjauan Umum Tentang Alat Pembayaran

Alat pembayaran merupakan bagian penting dari sistem pembayaran, sehingga sistem pembayaran harus memiliki alat pembayaran yang mendukung berjalannya sistem tersebut. Sistem pembayaran tidak dapat diputuskan dari instrumen pembayaran yang digunakan secara sah atau sejenisnya. Alat atau instrumen pembayaran dapat diartikan secara luas sebagai alat yang digunakan dalam transaksi yang bertujuan melakukan pembayaran untuk memperoleh barang, benda atau hal lain yang dibutuhkan seseorang. Alat pembayaran memiliki nilai tetap untuk memudahkan orang menukarkan hal yang diinginkan seseorang.

Sistem pembayaran meliputi alat pembayaran, prosedur perbankan terkait pembayaran, serta sistem transfer antar bank yang digunakan dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai suatu cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain sebagai akibat dari suatu transaksi keuangan. Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat portable atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (*stability*).³¹ Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 ayat (1) mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Semakin berkembangnya teknologi saat ini, juga diikuti dengan pengembangan berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi

³¹ Gatot Suparmono, 2004, *Hukum Uang Di Indonesia*, Bekasi, Gramata Publishing, hlm 12.

microchips yang dikenal dengan *electronic money*. *Electronic money* muncul akibat semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah. *Electronic money* memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronik lainnya, pembayaran yang dilakukan menggunakan *e – money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan online secara langsung dengan rekening nasabah di bank.³²

Pasal 1 ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, mengatur bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan juga nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.³³

Keberadaan uang elektronik tidak hanya karena adanya inovasi di bidang perbankan, tetapi juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang nyaman dan dapat memudahkan transaksi.

³² Bambang Pramono, Tri Yanuarti, Pipih Purusitawati, Yosefin Tyas Emmy, 2006, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

³³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Kemudahan perdagangan ini dapat menekan biaya transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu uang elektronik yang saat ini sedang naik daun adalah *bitcoin*, dikarenakan *bitcoin* memenuhi beberapa kriteria sebagai uang elektronik yaitu tidak mudah musnah (*durability*) dan tidak mudah dipalsukan (*scarity*). Akan tetapi di Indonesia *bitcoin* belum dapat di gunakan sebagai alat pembayaran karena belum sah menurut undang-undang mata uang.